

PENGENTASAN KEMISKINAN DAN KETIMPANGAN SOSIAL DI DESA SIDOREJO KECAMATAN KRIAN SIDOARJO

Lailatul Chabibah¹, Lailatuz Fadiah², Liiza Rizka Nafisa³, Mohammad Dliyaul Muflih⁴,
Imam Buchori⁵, Ade Irma Suryani Lating⁶

^{1,2,3,4,5,6}Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Email: lailatulchabibah2003@gmail.com¹, lailatuzf10@gmail.com², lisanafisa08@gmail.com³,
mdliyaulmuflih@uinsa.ac.id⁴, ibe@uinsa.ac.id⁵, ade.irma@uinsa.ac.id⁶

ABSTRACT: *This study examines the conditions of poverty and social inequality that occur in Sidorejo Village. Poverty is described as the inability of people to meet basic needs such as food, clothing, shelter, education, and health. Socioeconomic inequality can be seen from differences in income, access to health and education facilities, and job opportunities in the village. The main causes include low levels of education, limited access to basic services, and unequal distribution of wealth and opportunities. Various mitigation efforts are carried out through improving skills, access to capital, and improving basic facilities to reduce social disparities and improve the quality of life of the community. In addition, community participation and cooperation between parties are key to ensuring the sustainability of poverty alleviation programs and reducing social inequality. This study uses a qualitative approach with data collection through observation, interviews, and literature studies from various relevant sources. The results of the study indicate that poverty alleviation requires sustainable and integrated cross-sectoral efforts.*

Keywords: *Poverty, Inequality*

ABSTRAK: Penelitian ini mengkaji kondisi kemiskinan dan ketimpangan sosial yang terjadi di Desa Sidorejo. Kemiskinan digambarkan sebagai ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Ketimpangan sosial ekonomi terlihat dari perbedaan pendapatan, akses terhadap fasilitas kesehatan dan pendidikan, serta peluang kerja di desa tersebut. Faktor utama penyebabnya meliputi rendahnya tingkat pendidikan, keterbatasan akses terhadap layanan dasar, serta ketidakmerataan distribusi kekayaan dan peluang. Berbagai upaya penanggulangan dilakukan melalui peningkatan keterampilan, akses permodalan, dan peningkatan fasilitas dasar guna mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selain itu, partisipasi masyarakat dan kerjasama antar pihak menjadi kunci dalam memastikan keberlanjutan program pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi literatur dari berbagai sumber relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengentasan kemiskinan membutuhkan upaya lintas sektor yang berkelanjutan dan terintegrasi.

Kata Kunci: Kemiskinan, Ketimpangan

PENDAHULUAN

Masalah kesenjangan pendapatan dan kemiskinan tidak hanya dihadapi oleh negara sedang berkembang, namun negara maju sekalipun tidak terlepas dari permasalahan ini. Perbedaannya terletak pada proporsi atau besar kecilnya tingkat kesenjangan dan angka kemiskinan yang terjadi, serta tingkat kesulitan mengatasinya yang dipengaruhi oleh luas wilayah dan jumlah penduduk suatu negara. Semakin besar angka kemiskinan, semakin tinggi pula tingkat kesulitan mengatasinya. Negara maju menunjukkan tingkat kesenjangan pendapatan dan angka kemiskinan yang relatif kecil dibanding negara sedang berkembang dan untuk mengatasinya tidak terlalu sulit mengingat GDP dan GNP mereka relatif tinggi. Walaupun demikian, masalah ini bukan hanya menjadi masalah internal suatu negara, namun telah menjadi permasalahan bagi dunia internasional, tidak terkecuali Negara Indonesia.

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang saat ini masih memiliki berbagai masalah perekonomian. Beberapa masalah perekonomian yang terjadi diantaranya kemiskinan dan ketimpangan pendapatan, keduanya merupakan isu sosial-ekonomi utama yang terus menjadi tantangan pembangunan ekonomi di Indonesia. Pembangunan ekonomi di Indonesia masih belum sepenuhnya dapat menyelesaikan masalah kemiskinan dan ketimpangan pendapatan yang semakin luas dengan naiknya pertumbuhan ekonomi.

Kemiskinan sering didefinisikan sebagai keadaan di mana individu, kelompok, atau masyarakat secara relatif

atau absolut tidak memiliki akses yang memadai terhadap sumber daya ekonomi, sosial, dan politik yang diperlukan untuk mencapai standar hidup yang layak. Ini mencakup kekurangan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan layanan kesehatan (Zunaidi et al., 2023).

Menurut data BPS Persentase penduduk miskin pada September 2024 sebesar 8,57 persen, menurun 0,46 persen poin terhadap Maret 2024 dan menurun 0,79 persen poin terhadap Maret 2023. Jumlah penduduk miskin pada September 2024 sebesar 24,06 juta orang, menurun 1,16 juta orang terhadap Maret 2024 dan menurun 1,84 juta orang terhadap Maret 2023. Persentase penduduk miskin perkotaan pada September 2024 sebesar 6,66 persen, menurun dibandingkan Maret 2024 yang sebesar 7,09 persen. Sementara itu, persentase penduduk miskin perdesaan pada September 2024 sebesar 11,34 persen, menurun dibandingkan Maret 2024 yang sebesar 11,79 persen. Dibanding Maret 2024, jumlah penduduk miskin September 2024 perkotaan menurun sebanyak 0,59 juta orang (dari 11,64 juta orang pada Maret 2024 menjadi 11,05 juta orang pada September 2024). Sementara itu, pada periode yang sama, jumlah penduduk miskin perdesaan menurun sebanyak 0,57 juta orang (dari 13,58 juta orang pada Maret 2024 menjadi 13,01 juta orang pada September 2024). Garis Kemiskinan pada September 2024 tercatat sebesar Rp595.242,00/kapita/ bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp443.433,00 (74,50 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan

sebesar Rp151.809,00 (25,50 persen). Pada September 2024, rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,71 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya garis kemiskinan per rumah tangga secara rata-rata adalah sebesar Rp2.803.590,00/rumah tangga miskin/bulan.

Menurut [Metrotvnews.com](http://metrotvnews.com) BPS mencatat kemiskinan tertinggi tercatat di Papua Pegunungan sebesar 29,66 persen. Sedangkan tingkat kemiskinan terendah tercatat di Bali yaitu sebesar 3,80 persen. Amalia menambahkan, penduduk miskin masih terkonsentrasi di Pulau Jawa yaitu sebanyak 12,62 juta orang atau sekitar 52,45 persen dari total penduduk miskin di Indonesia berlokasi di Pulau Jawa. Selanjutnya, penduduk miskin juga terkonsentrasi di Sumatra dengan porsi 21,82 persen. Di sisi lain, untuk jumlah penduduk miskin yang paling sedikit ada di Pulau Kalimantan yaitu sebesar 0,91 juta orang.

Ketimpangan sering didefinisikan sebagai suatu kondisi ketidakadilan. Kondisi ketika beberapa orang atau kelompok memiliki hak dan kesempatan lebih baik dibandingkan individu atau kelompok lainnya. Biasanya, kondisi ini terjadi dalam sebuah perbandingan antara dua titik ekstrem. Ketimpangan pendapatan seringkali muncul sebagai akibat dari adanya ketimpangan dalam hal akses, kesempatan, dan kesetaraan dalam memenuhi kebutuhan dasar. Hal inilah yang menjadikan ketimpangan tidak lahir secara alamiah, melainkan karena diciptakan oleh kondisi dan kebijakan publik (Maulana et al., 2023).

Desa Sidorejo, yang terletak di Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo,

dengan jumlah penduduk sekitar 10.895 jiwa, merupakan salah satu desa yang masih menghadapi tantangan serius dalam hal kemiskinan dan ketimpangan sosial ekonomi. Meskipun berada di wilayah yang relatif dekat dengan pusat industri dan perdagangan di Kabupaten Sidoarjo, kenyataannya masih banyak warga Desa Sidorejo yang hidup dalam kondisi ekonomi yang memprihatinkan. Kemiskinan di desa ini bersifat multidimensi dan tidak hanya disebabkan oleh rendahnya pendapatan, tetapi juga oleh sejumlah faktor lain yang saling terkait seperti keterbatasan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, serta minimnya kesempatan kerja yang layak. Secara ekonomi, mayoritas penduduk menggantungkan hidup dari sektor informal, seperti buruh harian, petani penggarap, dan pedagang kecil, yang pendapatannya tidak tetap dan sangat rentan terhadap gejolak ekonomi. Di sisi lain, ketimpangan pendapatan antarwarga juga mulai terlihat, di mana segelintir warga dengan akses modal dan jejaring sosial yang baik mampu meningkatkan taraf hidupnya, sementara sebagian besar lainnya tetap terperangkap dalam lingkaran kemiskinan struktural. Dari aspek sosial, ketergantungan terhadap bantuan pemerintah seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) menandakan lemahnya pemberdayaan masyarakat miskin untuk keluar dari kondisi tersebut secara mandiri. Pendidikan juga menjadi masalah krusial, karena masih banyak anak-anak di Desa Sidorejo yang putus sekolah atau tidak dapat melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi akibat keterbatasan ekonomi keluarga. Rendahnya tingkat pendidikan ini

kemudian berdampak langsung pada terbatasnya peluang kerja dan rendahnya daya saing tenaga kerja lokal. Selain itu, keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan, buruknya sanitasi, dan masalah gizi pada kelompok rentan seperti balita dan lansia memperburuk kualitas hidup masyarakat miskin di desa ini. Secara keseluruhan, kondisi ini mencerminkan adanya ketimpangan struktural yang cukup serius dan membutuhkan perhatian lintas sektor, baik dari pemerintah desa, pemerintah daerah, maupun lembaga-lembaga pemberdayaan masyarakat, agar upaya pengentasan kemiskinan dapat berjalan secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk memahami secara mendalam kondisi kemiskinan dan ketimpangan di desa Sidorejo. Selain itu, makalah ini bertujuan sebagai dasar dalam perancangan kebijakan dan program yang tepat sasaran untuk mengatasi permasalahan tersebut. Selain memperkaya pengetahuan, kegiatan ini juga bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat serta pemangku kepentingan mengenai faktor-faktor penyebab kemiskinan dan ketimpangan sosial di desa tersebut.

Untuk memecahkan masalah ketimpangan ekonomi dan kemiskinan di Desa Sidorejo, berbagai solusi strategis telah dirancang. Salah satunya adalah pemberian pelatihan keterampilan dan sertifikasi kepada pekerja di sektor industri kecil agar mereka mampu bersaing di sektor industri menengah atau membuka usaha yang lebih besar. Selain itu, peningkatan akses permodalan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah

(UMKM) melalui program kredit seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) diharapkan dapat membantu pelaku usaha memperluas dan meningkatkan daya saing usaha mereka. Langkah lain yang dilakukan adalah pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yang memberikan peluang bagi pedagang kaki lima dan usaha kecil lainnya untuk mendapatkan lokasi strategis dan mengembangkan usaha mereka. Dengan demikian, kombinasi peningkatan kapasitas masyarakat dan akses ke sumber daya ekonomi ini diharapkan dapat mengurangi ketimpangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Konsep Kemiskinan dalam Literatur Islam : Beberapa ulama dan cendekiawan Muslim membedakan antara kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Menurut Chapra (2000), Islam memandang kemiskinan sebagai kondisi yang tidak ideal dan berusaha menghapusnya melalui sistem distribusi kekayaan yang adil. Al-Ghazali dalam Ihya' Ulumuddin menyebutkan bahwa kemiskinan dapat merusak moral dan keimanan seseorang bila tidak ditangani dengan benar.

Teori Ketimpangan dalam Ekonomi Islam: Menurut Siddiqi (1981), ketimpangan dalam Islam bukan hanya masalah ekonomi, tetapi masalah keadilan sosial. Ketimpangan yang tinggi dianggap bertentangan dengan prinsip 'adl (keadilan) dalam Islam. Dalam Maqashid al-Shariah, salah satu tujuan syariah adalah menjaga harta, yang mencakup distribusi kekayaan yang seimbang.

Instrumen Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan: Banyak literatur

menekankan pentingnya instrumen keuangan Islam seperti zakat, infaq, sedekah, dan wakaf. Kahf (1999) menyebut zakat sebagai mekanisme distribusi kekayaan yang paling efektif karena bersifat wajib dan memiliki dasar legal dalam syariat.

METODE PELAKSANAAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang dirancang untuk memahami kondisi kemiskinan dan ketimpangan di Desa Sidorejo secara mendalam. Rancangan kegiatan meliputi observasi langsung ke lapangan untuk mengidentifikasi kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, serta wawancara dengan narasumber seperti perangkat desa dan warga setempat untuk memperoleh data primer.

Ruang lingkup penelitian terbatas pada masyarakat di Desa Sidorejo, terutama yang mengalami kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Objek penelitian meliputi faktor-faktor penyebab kemiskinan dan ketimpangan.

Bahan utama terdiri dari data hasil observasi, wawancara, serta dokumen dan data statistik desa yang relevan. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumentasi.

Definisi operasional variabel penelitian meliputi: a. Kemiskinan: kondisi masyarakat yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan. b. Ketimpangan: perbedaan pendapatan dan fasilitas sosial antara kelompok masyarakat yang berbeda secara ekonomi di desa.

teknik analisis data dilakukan secara kualitatif melalui pendekatan interpretatif, dengan menelaah data dari hasil wawancara dan observasi untuk menemukan pola, hubungan, dan faktor penyebab utama yang berkontribusi terhadap kemiskinan dan ketimpangan di desa tersebut

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya seperti sandang (pakaian), pangan (makanan), papan (tempat tinggal) kesehatan dan pendidikan (Winne Ayunda Gaiska et al., 2023). Kemiskinan dapat dibagi dalam empat bentuk, yaitu: Pertama, kemiskinan absolut: bila pendapatannya di bawah garis kemiskinan atau tidak cukup untuk memenuhi pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja, contohnya kebutuhan masyarakat pedesaan berbeda dengan kebutuhan masyarakat perkotaan, dan begitu pula antara masyarakat desa pertanian dan desa nelayan. Meskipun demikian konsep ini sangat populer (Adawiyah, 2020). Kedua, kemiskinan relatif: kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan pada pendapatan, misalnya terdapat seseorang yang menghuni di kawasan elit, yang sebenarnya memiliki penghasilannya yang dianggap cukup dalam memenuhi kebutuhan minimum, namun penghasilannya tersebut masih jauh lebih rendah dari rata-rata pendapatan masyarakat sekitarnya. Pada dasarnya, kemiskinan ini lebih banyak ditentukan oleh faktor lingkungan di

sekitarnya. Ketiga, kemiskinan kultural: mengacu pada persoalan sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros, tidak kreatif meskipun ada bantuan dari pihak luar. Keempat, kemiskinan struktural: situasi miskin yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu sistem sosial budaya dan sosial politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan, tetapi kerap menyebabkan suburnya kemiskinan (Adawiyah, 2020).

Kondisi kemiskinan Desa Sidorejo dapat dilihat dari rumah yang tidak layak huni, kondisi ini memicu gerakan bedah rumah, bagi keluarga miskin diprioritaskan untuk membeli makanan daripada pakaian, kondisi tersebut menunjukkan mendesaknya kebutuhan pangan dibandingkan pakaian bagi keluarga yang kurang mampu memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Hal tersebut memicu Desa menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT), Selain itu dilihat dari faktor pendidikan, terdapat beberapa anak yang tidak bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi karena keterbatasan biaya. Untuk mengatasi hal tersebut desa menyalurkan bantuan pendidikan berupa program keluarga harapan (PKH).

Penghasilan penduduk Desa Sidorejo bersumber dari sektor pertanian, sektor industri menengah, sektor industri kecil, dan sektor jasa. Selain itu terdapat 237 jiwa orang yang bekerja tidak tentu.

Sektor industri kecil memiliki peluang untuk menanggulangi

kemiskinan di Desa Sidorejo melalui terbukanya lapangan kerja, peningkatan pendapatan, dan pengembangan keterampilan. Kondisi kemiskinan di Desa Sidorejo dapat dilihat dari beberapa faktor, pertama faktor Ekonomi diantaranya Pendapatan perbulan tidak menentu, Tidak memiliki modal kerja, serta modal kecil/pas-pasan, Pekerjaan tidak menentu (serabutan). Kedua faktor Sosial diantaranya terjebak pada rentenir atau bank harian, salah satu anggota keluarga mengalami sakit berkepanjangan dan membutuhkan perawatan rutin, menanggung orang tua atau anggota keluarga yang sudah lanjut usia dan tidak dapat bekerja lagi. Ketiga faktor pendidikan diantaranya tingkat pendidikan rendah. Keempat faktor kesehatan diantaranya sanitasi dan kebersihan lingkungan yang buruk, keterbatasan akses jaminan Kesehatan, rentan terhadap penyakit dan gizi buruk. Dilihat dari beberapa faktor diatas masyarakat Desa Sidorejo yang mengalami keadaan tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar secara layak seperti makanan, tempat tinggal, pakaian, layanan kesehatan dan pendidikan.

Perkembangan industri di sekitar Desa Sidorejo membawa berbagai konsekuensi yang menyebabkan masyarakat lokal mengalami kesulitan ekonomi diantaranya: a. Kenaikan biaya hidup banyak pekerja yang datang dari luar daerah menyewa rumah di Desa Sidorejo. Hal ini menyebabkan lonjakan harga sewa rumah dan tanah, yang kemudian memberatkan warga lokal terutama mereka yang bekerja di sektor industri kecil dengan pendapatan rendah. b. Persaingan Tidak Seimbang dengan

Bisnis Besar Kehadiran toko-toko modern seperti Indomaret dan Alfamart di sekitar Sidorejo telah menggerus pangsa pasar usaha kecil seperti warung tradisional dan pedagang kelontong. Pedagang lokal sulit bersaing karena keterbatasan modal dan daya saing harga.

c. Pengurangan Lahan Pertanian
Perubahan fungsi lahan dari pertanian menjadi kawasan industri atau perumahan telah mengurangi ruang kerja bagi buruh tani. Seiring waktu, banyak dari mereka kehilangan pekerjaan. Meskipun beberapa mencoba beralih menjadi buruh pabrik, keterbatasan keterampilan menjadi hambatan bagi sebagian besar buruh tani untuk memasuki sektor menengah.

Kebijakan yang dilakukan Desa Sidorejo untuk menanggulangi kemiskinan : Memberikan program pinjaman seperti kredit usaha rakyat (KUR), mengadakan pelatihan kerja , memberikan program bantuan sosial berupa bedah rumah, memberikan bantuan langsung tunai (BLT), memberikan bantuan pangan non tunai (BPNT), memberikan program PKH (Program Keluarga Harapan), melakukan penyemprotan insektisida (Fogging), menyediakan fasilitas pondok bersalin desa (POLINDES), mendorong dan menggerakkan Upaya perbaikan gizi.

Ketimpangan merupakan salah satu penghambat dalam pembangunan ekonomi di setiap negara. Perbedaan pendapatan terlihat membuat jarak antar kelompok kaya dan miskin semakin jauh dan kesejahteraan secara tidak merata menunjukkan masih banyak kelas masyarakat atas dengan bawah (Farhan & Sugianto, 2022).

Desa Sidorejo yang terletak di Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, tengah mengalami perbedaan yang signifikan akibat perkembangan kawasan industri di sekitarnya. Kedekatan desa ini dengan beberapa pabrik besar di sepanjang kawasan Jalan Raya Krian-Taman telah menjadikan banyak penduduknya beralih menjadi pekerja di sektor industri menengah seperti karyawan swasta. Namun, di sisi lain, masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada sektor industri kecil seperti pedagang kaki lima, buruh tani, dan pekerja serabutan justru menghadapi tantangan besar akibat dampak ekonomi yang tidak merata. Perbedaan pendapatan, kesejahteraan, dan akses terhadap fasilitas sosial semakin menciptakan ketimpangan antara kedua kelompok ini. Dalam jangka panjang, ketimpangan ekonomi ini dapat menjadi ancaman serius yang berpotensi memunculkan kemiskinan struktural baru di wilayah tersebut.

Ketimpangan antara sektor industri menengah dan sektor industri kecil dapat dilihat dari perbedaan pendapatan dan fasilitas kesejahteraan. Penduduk Desa Sidorejo yang bekerja di sektor industri menengah, terutama sebagai buruh pabrik, mendapatkan upah minimum kabupaten (UMK) Sidoarjo yang mencapai sekitar Rp4,7 juta per bulan. Sebaliknya, pekerja di sektor industri kecil seperti pedagang kaki lima, buruh tani, dan pekerja lepas sering kali hanya mendapatkan penghasilan jauh di bawah Rp2 juta per bulan. Pekerjaan mereka cenderung tidak stabil, tanpa kepastian pendapatan. Ketidakmampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar, terutama saat harga kebutuhan pokok

meningkat, membuat mereka lebih rentan terhadap tekanan ekonomi.

Adapun dampak ketimpangan ekonomi terhadap kehidupan masyarakat lokal, pertama, peningkatan angka pengangguran terselubung yaitu sulitnya mencari pekerjaan yang layak di sektor menengah maupun sektor jasa membuat sebagian warga memilih untuk tetap bekerja di sektor industri kecil, meskipun dengan pendapatan kecil dan tidak menentu. Beberapa bahkan berhenti mencari pekerjaan dan menjadi pengangguran terselubung. Kedua, kenaikan harga tanah dan sewa rumah mendorong beberapa warga untuk tinggal di tempat yang kurang layak. Pemukiman kumuh mulai bermunculan di sekitar area Desa Sidorejo, yang berpotensi menimbulkan masalah sosial seperti meningkatnya angka kriminalitas dan masalah kesehatan masyarakat. Ketiga, perpindahan masyarakat lokal dari desa. Beberapa warga lokal yang tidak mampu bersaing secara ekonomi memilih untuk pindah dari Desa sidorejo ke daerah lain yang lebih murah. Hal ini dapat mengurangi kohesi sosial dan mengubah demografi desa secara signifikan.

Selain itu terdapat solusi untuk mengatasi ketimpangan ekonomi diantaranya, a. Pelatihan keterampilan dan sertifikasi untuk pekerja industri kecil: Pemerintah desa bekerja sama dengan dinas pendidikan atau lembaga pelatihan kerja dapat menyelenggarakan program pelatihan keterampilan bagi pekerja industri. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan mereka agar dapat bersaing di sektor industri menengah atau membuka usaha dengan

skala yang lebih besar. b. Peningkatan akses permodalan untuk UMKM: Memberikan program pinjaman dengan bunga rendah untuk pelaku usaha kecil seperti kredit usaha rakyat (KUR). Dengan adanya akses permodalan, UMKM di Sidorejo dapat meningkatkan daya saing dan memperluas usahanya. c. Mendirikan BUMDES (Badan Usaha Milik Desa): Bagi pedagang kaki lima memiliki peluang berjualan di lokasi yang strategis. Hal ini dapat memberikan peluang bagi pedagang kaki lima untuk mengembangkan usaha mereka.

Sesuai dengan teori yang menyebutkan bahwa Kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya seperti sandang (pakaian), pangan (makanan), papan (tempat tinggal) kesehatan dan pendidikan. Maka, Desa ini bisa dikatakan menghadapi tantangan ekonomi dalam hal kemiskinan ditandai dengan adanya rumah yang tidak layak huni, terdapat beberapa keluarga yang kurang mampu memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari serta terdapat beberapa anak yang tidak bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi karena keterbatasan biaya.

Masyarakat yang menggantungkan penghidupan pada sektor industri kecil dan serabutan cenderung mengalami pendapatan yang tidak stabil dan terbatas, sedangkan sebagian kecil yang bekerja di sektor industri menengah dan jasa mendapatkan penghasilan lebih stabil dan tinggi. Situasi ini memperlihatkan adanya ketimpangan pendapatan yang semakin melebar, yang

menjadi salah satu indikator ketimpangan struktural.

Tabel 1. Data Pendapatan

No	Pendapatan Rill Keluarga	Jumlah
1	Jumlah kepala keluarga	3121 KK
2	Jumlah anggota keluarga	6307 orang
3	Jumlah pendapatan kepala keluarga	Rp 10.923.500.000
4	Jumlah pendapatan dari anggota keluarga yang bekerja	Rp 4.313.581.000



Gambar 1. Hasil Program Bedah Rumah

Gambar 1 merupakan contoh hasil program bedah rumah dari BAZNAS yang disalurkan desa. Program bedah rumah bertujuan untuk memperbaiki rumah tidak layak huni agar menjadi layak huni

SIMPULAN

Kondisi kemiskinan di Desa Sidorejo ditandai dengan rendahnya penghasilan masyarakat, dan ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan. Banyak penduduk yang bergantung pada sektor industri menengah, industri kecil, dan jasa, serta adanya pekerja yang bekerja tidak tentu dan pekerjaan serabutan. Selain faktor ekonomi, kemiskinan juga dipengaruhi oleh rendahnya tingkat pendidikan, dan sikap yang pasif dalam upaya memperbaiki kondisi hidup. Berbagai

program bantuan telah dilakukan oleh desa untuk mengatasi kemiskinan, namun kondisi tersebut masih memerlukan perhatian serius dan keberlanjutan dalam upaya perbaikan kualitas hidup masyarakat.

Ketimpangan di Desa Sidorejo terlihat dari perbedaan pendapatan. Penduduk yang bekerja di sektor industri menengah, seperti karyawan pabrik, mendapatkan upah yang cukup stabil, sekitar Rp4,7 juta per bulan, sementara mayoritas pekerja di sektor industri kecil dan serabutan hanya memperoleh penghasilan di bawah Rp2 juta per bulan yang tidak stabil. Selain itu, terdapat perbedaan dalam fasilitas kesehatan, pendidikan, dan perumahan. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan ekonomi yang semakin melebar, yang disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk akses pendidikan, dan peluang kerja yang terbatas. Ketimpangan ini menghambat proses pembangunan yang merata dan dapat berpotensi menimbulkan kemiskinan struktural baru di desa tersebut.

DAFTAR RUJUKAN

- Adawiyah, E. (2020). *Kemiskinan Dan Faktor-Faktor Penyebabnya*. 1(April), 43–50.
- Farhan, M., & Sugianto, S. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Ketimpangan Pendapatan Di Pulau Jawa. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(4), 243–258. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i4.29>
- Maulana, A., Rusmini, R., Mukaromah, V., & Nafisa, Y. (2023).

Pembangunan Ekonomi Islam. In
*Jurnal Akuntansi, Manajemen,
Bisnis dan Teknologi (AMBITEK)*
(Vol. 3, Issue 2).
<https://doi.org/10.56870/ambitek.v3i2.81>

Winne Ayunda Gaiska, Naufal

GamaAffandyar, & Muhammad Yasin.
(2023). Analisis Penyebab,
Konsekuensi, Dan Solusi Potret
Kemiskinan Di Kabupaten
Mojokerto Pasca Reformasi. *Jurnal
Akuntan Publik*, 1(2), 141–149.
<https://doi.org/10.59581/jap-widyakarya.v1i2.386>

Zunaidi, A., Humaira, V. A., Nabil, N.,
Saputra, G., Ismail, I., & Murlianti,
M. (2023). *Manajemen Zakat dan
Waqaf*. 3(2), 40–44.
[https://repository.iainkediri.ac.id/1034/1/Manajemen Ziswaf 2023.pdf](https://repository.iainkediri.ac.id/1034/1/Manajemen%20Ziswaf%202023.pdf)